

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan pada dasarnya untuk mengetahui dan mengevaluasi suatu laporan keuangan untuk memprediksi kondisi kinerja keuangan entitas dimana dapat bertujuan untuk memberikan pertimbangan bagi entitas dengan tingkat profitabilitas dan tingkat risikonya. Menurut Poltak Sinaga (2014 : 220), Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecendrungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan atau entitas yang bersangkutan.

Analisis laporan keuangan berarti menjabarkan pos-pos laporan menjadi suatu unit informasi yang lebih kecil, untuk melihat hubungan antara laporan keuangan dan data lainnya secara kuantitatif ataupun kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan entitas secara lebih khusus. Menganalisis suatu laporan keuangan ditujukan untuk mendalami informasi lebih banyak yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut.

2.1.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi.

2.1.3 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Fahmi (2011) Analisis Rasio Keuangan adalah instrumen analisis prestasi dari entitas yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan

tersebut untuk kemudian menunjukkan peluang yang melekat pada entitas yang bersangkutan. Syafri (2006:297) menyatakan rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu laporan keuangan dengan laporan yang lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan contohnya antara utang dan modal, antara kas dan total aset, dan sebagainya. Sementara itu Jumingan (2006:44) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan adalah alat utama dalam menganalisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan entitas.

1. Rasio Likuiditas

Menurut Sugiyarso dan Winarni (2005), likuiditas adalah ratio yang mengukur kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek.

Menurut Kasmir (2010), perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap entitas. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari hasil rasio likuiditas :

- a. Untuk mengukur kemampuan entitas membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
- b. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- c. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas entitas dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- d. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki entitas, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.

- e. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar entitas tersebut. Lalu untuk mengetahui apakah likuid atau tidak yaitu dengan melihat hasilnya, jika negatif maka tidak likuid atau tidak mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan perbandingan antara total aktiva dengan total utang. Ukuran ini mensyaratkan agar perusahaan mampu memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Kasmir (2010), manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah:

- a. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- b. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- d. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- e. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- f. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

- g. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total aset dengan total utang yang dimiliki entitas tersebut, jika hasilnya positif maka entitas tersebut sangat mampu untuk melunasi seluruh kewajibannya begitu pula sebaliknya.

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan entitas dalam membiayai sendiri kegiatan operasional, pembangunan dan pelayanan kepada eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak perusahaan pusat semakin rendah demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi dalam kinerja tersebut. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi kinerja karyawan dalam melakukan pekerjaannya dan semakin baik laporan keuangan perusahaan. Secara sederhana rasio kemandirian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{pendapatan}}{\text{transfer pusat} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel II. 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berikut penjelasan atas pola hubungan tersebut:

- 1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah yang tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas sebagai berikut:

- 1) Jika nilai rasio kurang dari 100% ($x < 100\%$) artinya tidak efektif
- 2) Jika nilai rasio sama dengan 100% ($x = 100\%$) artinya efektivitas berimbang.

3) Jika nilai rasio lebih dari 100% ($x > 100\%$) artinya efektif.

5. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik, sebagaimana pada tabel II.2 Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung dengan baik berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. . Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel II. 2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Diolah oleh Penulis

6. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengutamakan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya

secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Kesenjangan ini, yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi (2010)). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

7. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2007). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$R = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya

dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

2.2 Analisis Kinerja Keuangan

2.2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektifitas yang berkaitan dengan produktivitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggungjawabkan (Mangkunegara : 2002). Dapat diartikan juga, kinerja merupakan hasil keberhasilan seorang atau kelompok individu dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau kelompok di sebuah instansi atau organisasi, yang dilakukan oleh segala segmen, peringkat dan jabatan di suatu instansi ataupun organisasi.

Menurut Mangkunegara (2013:67), istilah kinerja berawal dari kata *Job performance* atau *actual performance* yakni prestasi kerja atau kerja sesungguhnya. Dari seorang pegawai/karyawan, maka pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sementara itu menurut Mulyadi (2015:63), mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

2.2.2 Kinerja Keuangan Dalam Pemerintah Daerah

Bab V Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012).

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan

melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.